

ABSTRAK

Penggunaan teknologi informasi dengan menggunakan *interconnection-networking* atau internet sudah menjadi bagian penting dan memudahkan kehidupan manusia. Hal ini termasuk dengan penggunaan *Online Dating Services* yang keberadaanya disalahgunakan pada aktifitas yang terindikasi prostitusi *online*. Dengan adanya indikasi tersebut pada beberapa situs maupun aplikasi kencan online, Pemerintah Indonesia melakukan pemblokiran sebagai bentuk pencegahan akibat dari adanya dampak dari keberadaan online dating services yang terindikasi prostitusi *online*. Tetapi adanya pemblokiran tersebut membuat para pengguna menggunakan *Virtual Private Network* (VPN), yang mana layanan ini adalah layanan yang menawarkan kerahasiaan data pengguna dan memudahkan dalam menembus akses blokir. Dengan demikian keberadaan VPN dirasa memudahkan akses *online dating services* yang terindikasi dengan prostitusi online. Selain itu, beberapa penyedia layanan VPN tidak memberikan larangan dan batasan maupun hak dan kewajiban pada *Terms of Services* (ToS) di layanannya, yang mana layanannya memiliki risiko dapat memudahkan praktik prostitusi *online* melalui menembus pemblokiran. Adanya pembiaran dan tidak adanya langkah pencegahan yang diberikan oleh penyedia sebagai penyedia jasa tentang larangan dan batasan pada layanannya dapat dikenai ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan dalam PERMA No. 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi. Selain itu, penyedia jasa atas layanannya akan bertanggung jawab sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik pada Undang-Undang No. 9 Tahun 2016 *juncto* Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Kata Kunci: *Virtual Private Network, Online Dating Services, Prostitusi Online, Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.*

ABSTRACT

The use of information technology by using interconnection-networking or internet has become an important part and facilitate human life. This includes the use of Online Dating Services whose existence is misused in activities indicated by online prostitution. Given these indications on some sites and online dating applications, the Government of Indonesia is blocking as a form of prevention as a result of the existence of online dating services indicated by online prostitution. But the blocking lets the users to use Virtual Private Network (VPN), which is a service that offers the confidentiality of user data and makes it easy to break through blocking access. Thus, the existence of a VPN is considered to facilitate access to online dating services indicated by online prostitution. Additionally, some VPN service providers do not impose restrictions and limitations and rights and obligations on the Terms of Services (ToS) in the service, whose services are at risk of facilitating the practice of online prostitution through blocking. The existence of omission and the absence of preventive measures provided by the providers as providers of the services and restrictions on its services may be subject to the provisions of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection and also in Supreme Court Regulations no. 13 of 2016 on the Procedures of Handling Criminal Cases by Corporations. In addition, the service provider for its services will be responsible as the Operator of Electronic Systems in Law no. 9 Year 2016 juncto Act no. 11 Year 2008 concerning Information and Electronic Transactions and Government Regulation no. 82 of 2012 on the Implementation of Electronic Transactions and Systems.

Keywords: Virtual Private Network, Online Dating Services, Online Prostitution, Implementation of Electronic System and Transaction.